

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 9 Juli 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (Halaman 10)	Selasa, 9 Juli 2019	Lampung Siap Menjadi Ibukota Negara	Lampung siap menjadi ibukota negara. Demikian diungkapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam menanggapi kesiapan Lampung menjadi ibukota negara kemarin.
2	Media Indonesia (Halaman 15)	Selasa, 9 Juli 2019	Berita Foto	Kemernterian PUPR tengah menyiapkan skema penyediaan hunian untuk generasi milenial yang diarahkan vertical atau rumah sederhana bersubsidi melalui Program Satu Juta Rumah.
3	Kompas (Halaman 15)	Selasa, 9 Juli 2019	Maluku Rentan Gempa dan Tsunami	Wilayah Maluku dan Maluku Utara amat rentan diguncang gempa bumi dan tsunami. Karena itu, upaya mitigasi bencana di kawasan itu perlu diperkuat.
4	Kompas (Halaman 16)	Selasa, 9 Juli 2019	Badan Pengelola Segera Dibentuk	Penetapan Tambang Batubara Ombilin Swahlunto sebagai warisan budaya dunia perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan badan pengelola.
5	Kompas (Halaman 18)	Selasa, 9 Juli 2019	Perencanaan NCICD Dinilai Tertutup	NCICD dinilai tertutup bagi public. Pemerintah diminta mendengarkan masukan ahli agar proyek perlindungan daratan DKI Jakarta ini menggunakan solusi yang efektif.
6	Kompas (Halaman C)	Selasa, 9 Juli 2019	Surga Tersembunyi di Perbatasan Indonesia-Timor Leste	Jalan dari Atapupu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menuju Desa Tuamese tampak lengang, hanya ada beberapa sepeda motor melintas dari arah Atapupu menuju Wini, perbatasan dengan Oecussi, Timor Leste.
7	Tempo (Halaman 6)	Selasa, 9 Juli 2019	PUPR Gelontorkan Rp 78,75 miliar di NTB	Kementerian PUPR, melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, menggelontorkan dana program BSPS sebesar Rp 78,75 miliar.
8	Tempo (Halaman 17)	Selasa, 9 Juli 2019	Kota Bekasi Tolak Limpahan Kemacetan dari Jalan Tol Cikampek	Pemerintah Kota Bekasi memprotes pengelola jalan tol Jakarta-Cikampek, PT Jasa Marga, yang menyarankan kendaraan untuk keluar dari jalan tol menuju jalan arteri.
9	Tempo (Halaman 18)	Selasa, 9 Juli 2019	Kemacetan di Jalan Tol Cikampek Menular sampai Bogor	Kemacetan lalu lintas akibat sejumlah proyek infrastruktur di sekitar jalan tol Jakarta-Cikampek tak hanya tumpah ke jalan Kalimalang, Bekasi, dan sekitarnya.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 9 Juli 2019	PENGADAAN LAHAN TOL ACEH—SIGLI: Hutama Karya Siapkan Rp842 Miliar	PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan dana sebanyak Rp842 miliar untuk pengadaan lahan pada proyek jalan tol Banda Aceh—Sigli. Dana tersebut khusus dialokasikan untuk pengadaan lahan sepanjang 2019.
11	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 9 Juli 2019	Layanan PDAM Belum Optimal	Kementerian PUPR terus mendorong PDAM untuk terus meningkatkan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3) kepada masyarakat.
12	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 9 Juli 2019	Berita Foto	Progres pembangunan Ruas I Serang—Rangkasbitung sepanjang 26,5 km sebagai pendukung KEK Tanjung Lesung saat ini telah mencapai 96% dan ditargetkan rampung pada Desember 2019 dan mulai dioperasikan Februari 2020.
13	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 9 Juli 2019	Progres Tol Serang—Panimbang Capai 29%	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., masih terus membangun tol Serang—Panimbang untuk mendukung KEK Tanjung Lesung.
14	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Selasa, 9 Juli 2019	APARTEMEN DI BEKASI: Pengembang Andalkan Infrastruktur	Sejumlah pengembang properti terus menapakkan kakinya di Bekasi, Jawa Barat untuk pengembangan proyek-proyeknya tahun ini.

				Dengan adanya sejumlah pengembangan infrastruktur dinilai pengembang membuat Bekasi makin potensial.
--	--	--	--	--

Judul	Lampung Siap Menjadi Ibukota Negara	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 10)		
Resume	Lampung siap menjadi ibukota negara. Demikian diungkapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam menanggapi kesiapan Lampung menjadi ibukota negara kemarin.		

Lampung Siap Menjadi Ibu Kota Negara

LAMPUNG siap menjadi ibu kota negara. Demikian diungkapkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam menanggapi kesiapan Lampung menjadi ibu kota negara, kemarin.

Sebagai informasi, dukungan terhadap Lampung mencuat menyusul munculnya nama provinsi berjudul 'Gerbang Sumatra' itu sebagai salah satu alternatif ibu kota negara dalam Dialog Nasional Bappenas, beberapa waktu lalu.

Menurut Arinal, Lampung menjadi pilihan yang tepat sebab memenuhi kriteria yang disusun Bappenas.

Adapun kriteria Bappenas antara lain lokasi yang strategis, tersedia lahan luas milik pemerintah, bebas potensi bencana alam, tersedia sumber daya air yang cukup, dekat dengan kota yang sudah berkembang, potensi konflik sosial rendah, serta jarak tidak berdekatan dengan perbatasan negara.

"Saya rasa itu tepat dan benar, dan itu beralasan. Pertama, pusat ibu kota harus mencerminkan negara maritim, Lampung memenuhi syarat itu. Kedua, tidak jauh dari pusat ekonomi Jakarta. Dari Lampung ada berbagai alternatif transportasi dan dengan pesawat hanya

butuh 25 menit," jelas Arinal di kantornya, kemarin.

Selain itu, lanjutnya, Lampung merupakan lumbung pangan dan ternak nasional yang menyuplai sebagian besar kebutuhan Jakarta. Produk hortikultura di Lampung masuk dalam daftar 10 besar nasional sehingga ibu kota dipastikan tidak akan kekurangan pangan.

Dari sisi sosial budaya, penduduk Lampung berasal dari berbagai suku di Indonesia. Artinya, penyesuaian sosial budaya tidak akan menyulitkan. Perekonomian dan infrastruktur Lampung pun telah tumbuh sehingga tidak membutuh-

kan investasi terlalu besar.

Arinal melanjutkan, pihaknya akan menyiapkan lahan di lokasi yang bebas dari potensi bencana alam, yaitu di wilayah selatan Lampung yang jauh dari potensi gempa dan tsunami akibat aktivitas Anak Gunung Krakatau.

"Apakah lahannya ada? Tentu ada. Ketika negara membutuhkan, air, tanah, dan udara semua kita siapkan. Kita punya taman nasional yang lahannya mencapai 129 ribu hektare. Sebagian bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ibu kota. Insya Allah Lampung siap." (EP/N-3)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 15)		
Resume	Kemernterian PUPR tengah menyiapkan skema penyediaan hunian untuk generasi milenial yang diarahkan vertical atau rumah sederhana bersubsidi melalui Program Satu Juta Rumah.		



ANTARA/APRILLIO AKBAR

SKEMA UNTUK GENERASI MILENIAL: Warga berjalan di dekat proyek pembangunan hunian di Jakarta, Selasa (2/7). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyiapkan skema penyediaan hunian untuk generasi milenial yang diarahkan ke rumah vertikal atau rumah sederhana bersubsidi melalui Program Satu Juta Rumah.

Judul	Maluku Rentan Gempa dan Tsunami	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 15)		
Resume	Wilayah Maluku dan Maluku Utara amat rentan diguncang gempa bumi dan tsunami. Karena itu, upaya mitigasi bencana di kawasan itu perlu diperkuat.		

Maluku Rentan Gempa dan Tsunami

Wilayah Maluku dan Maluku Utara amat rentan diguncang gempa bumi dan tsunami. Karena itu, upaya mitigasi bencana di kawasan itu perlu diperkuat.

TERNATE, KOMPAS – Gempa susulan terjadi di Maluku Utara, menyusul gempa berkekuatan M 7 dan M 7,1 pada Minggu (7/7/2019) malam. Hingga Senin (8/7) pukul 14.00 terjadi 48 gempa susulan M 3,1 hingga M 5,5. Meski kejadian kali ini tak diikuti tsunami, daerah itu memiliki riwayat panjang gempa diikuti tsunami sehingga mitigasi perlu diperkuat.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa M 7 terjadi pada pukul 22.08 WIB. Episentrum gempa berada di dasar laut pada kedalaman 49 kilometer pada jarak 133 km arah barat Kota Ternate, Maluku Utara.

Kejadian itu membuat panik warga. Tanpa menanti informasi peringatan dini tsunami, warga menuju tempat lebih tinggi. Isu tsunami merebak sesaat setelah guncangan gempa terjadi hampir 10 detik itu.

Warga setempat terbiasa de-

ngan guncangan gempa. Jika guncangan terasa amat kuat, warga di pesisir berlarian untuk menghindari tsunami.

Menurut catatan BMKG Stasiun Geofisika Ternate, Maluku Utara diguncang gempa 862 kali pada 2016, 852 kali (2017), dan 903 kali (2018).

Sementara aktivitas warga di beberapa kota dan kabupaten di Sulawesi Utara kembali normal, kemarin, setelah peningkatan status bahaya tsunami pasca-gempa M 7 malam sebelumnya. Status bahaya dicabut sehingga warga bisa kembali ke rumah.

Berpotensi tsunami

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan, hasil pemodelan menunjukkan gempa itu berpotensi tsunami dengan level Waspada untuk wilayah Minahasa Selatan dan Minahasa Utara bagian selatan. Menurut pemantauan perubahan muka air laut di enam stasiun *tide gauge* di Bitung, Tobelo,

Ternate, Taliabu, Jailolo, dan Sanana selama dua jam, tak ada anomali. Karena itu peringatan dini tsunami diakhiri pukul 00.09 WIB tanggal 8 Juli 2019.

Rahmat menjelaskan, gempa itu tergolong dangkal sumbernya dan dipicu deformasi kerak bumi pada lempeng Laut Maluku. Gempa ini memiliki mekanisme sesar naik (*thrust fault*) akibat tekanan lempeng mikro Halmahera ke arah barat, dan tekanan lempeng mikro Sangihe ke arah timur. Akibatnya, lempeng laut Maluku terjepit hingga membentuk subduksi ganda ke bawah Halmahera dan Sangihe.

Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono menambahkan, gempa kali ini mirip dengan gempa M 7,3 yang terjadi pada 2014. Pusat gempa saat itu berjarak 160 km barat laut Ternate dengan kedalaman 48 km. Gempa saat itu juga memicu peringatan dini tsunami, tapi tinggi gelombang ter-

pantau 0,03 meter di Manado.

Hingga kemarin siang, gempa susulan 48 kali dengan magnitudo terbesar M 5,5 dan magnitudo terkecil M 3,1. Melihat besarnya energi terlepas, diperkirakan tak diikuti gempa susulan lebih kuat.

Daryono menjelaskan, zona tektonik di Laut Maluku amat aktif serta berulang kali dilanda gempa dan tsunami. Di kawasan ini, tepatnya sekitar Jailolo, mengalami gempa *swarm* atau gempa beruntun ribuan kali.

Kajian Hamzah Latief, Nang T Puspito, dan Fumihiko Imamura di *Journal of Natural Disaster Science* (2000) menyebutkan, dari tahun 1600 hingga 1999 terjadi 105 tsunami di Nusantara. Dari jumlah itu, Laut Maluku dilanda tsunami 32 kali (30,8 persen) dengan jumlah korban 7.576 orang. Jadi, lebih dari 60 persen tsunami di Indonesia terjadi di perairan Maluku dan Maluku Utara.

(OKA/FRN/FLO/AIK)

Judul	Badan Pengelola Segera Dibentuk	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 16)		
Resume	Penetapan Tambang Batubara Ombilin Swahlunto sebagai warisan budaya dunia perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan badan pengelola.		



Pemandu wisata (kanan) menjelaskan kepada para pengunjung terkait Lubang Tambang Mbah Soero, salah satu lubang tambang peninggalan Tambang Batubara Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat, Sabtu (29/6/2019). Situs warisan penambangan batubara Ombilin ini ditetapkan sebagai warisan dunia kategori benda oleh World Heritage UNESCO pada Sabtu (9/7), di Baku, Azerbaijan.

Badan Pengelola Segera Dibentuk

Penetapan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto sebagai warisan budaya dunia perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan badan pengelola.

PADANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera membentuk badan pengelola Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto yang baru ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 6 Juli 2019. Pembentukan badan pengelola merupakan salah satu catatan yang harus dipenuhi dalam penetapan itu.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan akan menggelar rapat paling lambat minggu depan untuk membahas pembentukan badan pengelola. Pemda juga akan berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Sawahlunto dan pemda enam kabupaten/kota lainnya yang juga terdapat bagian warisan itu.

"Kami perlu duduk bersama untuk membentuk badan pengelola untuk Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto. Menentukan struktur badan, program, hingga anggarannya. Pembentukan melibatkan provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, sebab ini juga milik nasional, tidak hanya daerah," kata Irwan, di Padang, Senin (8/6/2019).

Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam gelaran ke-43 Pertemuan Komite Warisan Dunia UNESCO di Baku, Azerbaijan, Sabtu (6/7). UNESCO memberikan sejumlah catatan yang harus diselesaikan paling lambat pada 2021.

Kota Sawahlunto—sekitar 95 kilometer dari Kota Padang—mulai menggarap konsep wisata tambang sejak tahun 2000-an. Hal itu diperkuat dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2/2001 tentang Visi-Misi Kota Sawahlunto, yakni menjadikan Sawahlunto sebagai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya Tahun 2020. Hingga se-

karang pariwisata di kota dengan luas 273,45 kilometer persegi dan dikelilingi Bukit Barisan itu terus berkembang.

Infrastruktur

Terkait pengembangan wisata di Sawahlunto, Irwan menyatakan, pemda akan memperbaiki dan melengkapi infrastruktur di Stasiun Kereta Sawahlunto, Lubang Tambang Mbah Soero, dan Museum Gudang Ransum. Adapun lokomotif "Mak Itam", kereta tua bekas pengangkut batubara yang sebelumnya jadi kereta wisata di stasiun, tidak beroperasi lagi karena rusak. Sementara Lubang Tambang Mbah Soero, yang masih curam, perlu disempurnakan agar lebih aman.

Infrastruktur pendukung seperti jalan, hotel, restoran, dan tempat parkir juga akan diperbaiki, dilengkapi, serta diperbanyak. Dengan demikian, semua kebutuhan wisatawan dapat terpenuhi kala berkunjung.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sumbar Ian Hanafiah mengingatkan pemda, khususnya Sawahlunto, agar mengembangkan warisan budaya dunia itu sesuai potensinya sebagai wisata tambang. Pemda perlu menyadari apa yang perlu dibangun dan apa yang tidak boleh dibangun. Sawahlunto tidak perlu mencontoh destinasi wisata lain yang ada di Sumbar.

"Sebagai *heritage*, pasar paket wisata Sawahlunto bukan *mass tourism*, tetapi paket *western*. Jadi, harus dikembangkan potensinya sebagai *heritage* karena banyak turis mancanegara yang suka," kata Ian.

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumbar Nurmatias beberapa waktu lalu mengatakan, terlepas dari cerita kelam perbudakan dalam pengoperasiannya, tambang batubara Ombilin menjadi pemasok penting industri di Hindia Belanda, Belanda, dan Eropa. (JOL)

Judul	Perencanaan NCICD Dinilai Tertutup	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 18)		
Resume	NCICD dinilai tertutup bagi public. Pemerintah diminta mendengarkan masukan ahli agar proyek perlindungan daratan DKI Jakarta ini menggunakan solusi yang efektif.		

TELUK JAKARTA

Perencanaan NCICD Dinilai Tertutup

JAKARTA, KOMPAS — Perencanaan desain Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD) dinilai tertutup bagi publik. Pemerintah diminta mendengarkan masukan ahli agar proyek perlindungan daratan DKI Jakarta ini menggunakan solusi yang efektif. Isu yang menjadi sorotan salah satunya tanggul lepas pantai atau dikenal sebagai *giant sea wall*.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata, yang juga anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, berpendapat, penandatanganan nota kesepahaman antara RI dengan Belanda dan Korea Selatan untuk melanjutkan kerja sama kajian dan penyusunan desain NCICD terkesan diam-diam.

Semestinya, sebelum mencapai tahap itu, pemerintah membuka diskusi dengan publik untuk mendapatkan masukan. Pakar diajak mengkaji manfaat dan kerugian desain yang direncanakan. "Model seperti saat ini prosesnya tertutup. Kita sama sekali tidak tahu bagaimana perencanaannya," ucapnya, Senin (8/7/2019).

Berdasarkan dokumen Roadmap Pengamanan dan Pengembangan Pesisir Jakarta dalam Konteks Regional (Oktober 2016) dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tahun 2010-2016 kawasan pesisir Ja-

Masalah yang mesti diatasi bukan di laut, melainkan di darat, yaitu penurunan muka tanah.

Marthin Hadiwinata

karta mengalami penurunan tanah 3-18 sentimeter per tahun.

Pada tahun 2016, lebih dari 70 persen lahan di Jakarta Utara di bawah muka laut, termasuk tanggul laut dan pantai.

Membandingkan data kenaikan muka laut dan penurunan muka tanah, Marthin menyebutkan, masalah yang mesti diatasi bukan di laut, melainkan di darat, yaitu penurunan muka tanah. Kajian-kajian menunjukkan, penurunan muka tanah antara lain disebabkan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan, beban bangunan, terutama gedung pencakar langit, konsolidasi alami lapisan-lapisan tanah aluvial, serta penurunan muka tanah karena gaya tektonik. Di antara berbagai faktor itu, pengambilan air tanah dinilai sebagai penyebab dominan.

Sementara itu, pemerintah melanjutkan kajian dan penyusunan desain mengenai Rencana Induk NCICD. Kajian dan penyusunan desain yang dila-

kukan bersama Belanda dan Korea Selatan tersebut direncanakan selesai pada 2020.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hari Suprayogi mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bantuan untuk membuat desain, antara lain penyusunan strategi, desain, analisis data, dan pemodelan mengenai Rencana Induk NCICD. Selain itu, disusun pula beberapa skenario, seperti ketika terjadi penurunan air tanah, skenario pembangunan *sea building block* atau tanggul di tengah laut yang menurut rencana sekaligus menjadi tol.

"Kerja sama ini untuk mengkaji dan rencana induk, termasuk menyusun pertimbangan pelaksanaannya. Kalau rencana induknya sudah ada di Bappenas," kata Suprayogi, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Suprayogi menambahkan, dari tujuh fase kegiatan kerja sama, yang sedang dilaksanakan adalah fase pertama sampai ketiga. Pembangunan tanggul sepanjang 20,1 kilometer merupakan penerapan dari kajian fase pertama.

Dari total 100 kilometer garis pantai Tangerang-DKI Jakarta-Bekasi, titik kritis penurunan tanah ada di DKI Jakarta sepanjang 20,1 kilometer itu.

Selain membangun tanggul, rencana induk juga mencakup pembangunan fasilitas sanitasi yang andal di DKI Jakarta. (JOG/NAD)

Judul	Surga Tersembunyi di Perbatasan Indonesia-Timor Leste	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman C)		
Resume	Jalan dari Atapupu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menuju Desa Tuamese tampak lengang, hanya ada beberapa sepeda motor melintas dari arah Atapupu menuju Wini, perbatasan dengan Oecussi, Timor Leste.		

DANAU TUAMESE

Surga Tersembunyi di Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Senin (20/5/2019) pukul 10.30 Wita, jalan dari Atapupu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menuju Desa Tuamese tampak lengang, hanya ada beberapa sepeda motor melintas dari arah Atapupu menuju Wini, perbatasan dengan Oecussi, Timor Leste.

Danau Tuamese terletak di sebelah selatan dari jalan Atapupu-Wini-Oecussi. Sekitar 2 kilometer selewat Desa Ponu di Kecamatan Kakuluk Mesak, Belu, pengunjung harus berbelok ke arah selatan, yakni arah pantai, menuju danau. Jalanan masih berupa jalan tanah, penuh debu dan bebatuan. Di musim hujan pengendara harus waspada karena jalanan menjadi lautan lumpur. Ban kendaraan bisa terperosok dan terbentur lumpur liat.

Di sepanjang jalan tampak rumah-rumah warga yang masih tradisional. Atap dan dinding rumah terbuat dari pelepah lontar. Ukuran rumah rata-rata sekitar 4 x 6 meter persegi. Di ruang nyaris tak bersekat itu mereka tidur, memasak maupun menerima tamu.

Tidak ada papan petunjuk yang menunjukkan arah danau dan berapa jarak dari jalan utama. Pengunjung harus beberapa kali bertanya karena ada beberapa belokan di jalan setapak. Saat bertanya pun harus menyebut nama Raja Ampat. Nama Danau Tuamese tidak dikenal warga.

Nama Raja Ampat digunakan media lokal karena pemandangan danau itu mirip wilayah Raja Ampat di Papua. Istilah itu beredar dari mulut ke mulut di kalangan warga Tuamese. Danau tersebut baru dikenal pada pertengahan tahun 2018.

Danau tersebut berada di ba-



Danau Tuamese di Desa Tuamese Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT belum dikenal luas masyarakat Timor apalagi masyarakat NTT. Danau ini terletak di balik bukit Tuamese sehingga sulit diketahui banyak orang. Penduduk setempat hanya mengenal danau ini sebagai genangan air laut.

lik bukit setinggi sekitar 40 meter. Saat mendaki bukit, pengunjung harus hati-hati menjejalkan kaki. Belum ada undak-undak dan batu tumpang mudah berguling jika diinjak.

Sesampai di puncak bukit, barulah danau terlihat. Panorama alam tampak sangat indah. Air di tiga laguna Tuamese tampak biru. Ketiga laguna berdekatan, dibatasi daratan sempit dan bukit-bukit kecil.

Danau ini mirip pulau Padar di Manggarai Barat. Bedanya, kalau Pulau Padar berbatasan langsung dengan laut, maka Danau Tuamese berada sekitar 2

kilometer dari bibir pantai.

Dari bukit Tuamese terlihat Laut Timor. Saat mendung, pelangi tampak menggelayut di kaki langit pantai Tuamese. Pada senja hari, burung-burung pantai kembali ke sarang dengan cericit bersahutan.

Terkait sebutan Raja Ampat bagi Danau Tuamese, Aleks Ludji (49), warga Desa Tuamese, berupaya menolak nama itu. "Kalau ada pertemuan desa, saya ajak warga agar jangan pakai lagi nama Raja Ampat. Kami mau gunakan nama asli, Danau Tuamese," katanya.

Menurut Ludji, Air danau berasal dari laut. Airnya terasa

asin. Meski demikian, danau ini tidak pernah kering saat air laut surut.

Belum disadari

Sampai kini potensi Danau Tuamese belum disadari pemerintah daerah maupun warga setempat. Padahal, jika dikembangkan danau ini bisa menjadi destinasi wisata di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Sejauh ini belum ada papan petunjuk bagi pengunjung yang hendak menuju danau, jalan masih buruk dan belum ada undak-undakan menuju puncak bukit. Perjalanan ke danau sebaiknya dilakukan pada siang

hari. Kondisi jalan masih berupa jalan tanah, di beberapa titik ada pepohonan di tengah jalan. Pengemudi harus waspada agar badan mobil tidak bergesekan dengan batang pohon.

Mama Marince Ludji (45), warga Desa Tuamese, menuturkan, danau mulai dikunjungi sejumlah orang dari Kupang akhir tahun 2018. Sejak itu, setiap bulan ada sejumlah pengunjung datang untuk berfoto dan menikmati pemandangan sekitar danau.

"Belum banyak orang Timor mengenal tempat ini. Kami juga tidak tahu kalau itu sebuah danau. Kami hanya tahu bahwa ada kubangan air yang merupakan bagian dari laut," katanya.

Meski danau ini berada di wilayah Timor Tengah Utara (TTU), tetapi lebih mudah dijangkau dari Atambua (Belu) dibanding dari Kefamenanu (TTU). Jarak Tuamese-Kefamenanu sekitar 100 kilometer, sedangkan jarak Tuamese-Atambua hanya 20 kilometer.

Saat ini, pengunjung bisa menikmati danau secara cuma-cuma, tidak ditarik tiket masuk. Pengunjung hanya perlu membayar parkir.

"Dulu parkir kendaraan gratis, tetapi karena ada anak nakal yang sering mencoret bodi kendaraan dan mengempiskan ban, sekarang kami yang jaga kendaraan pengunjung. Tarifnya Rp 10.000 per kendaraan, tetapi kadang terserah pengunjung karena ini tanpa karcis," kata Ludji.

Suku Sabu

Sebagian besar warga Desa Tuamese berasal dari suku Sabu. Hal ini terlihat dari penggunaan nama marga Sabu se-

perti Ludji, Riwu Kaho, Dimu, dan Malehere. Mereka mendiami pantai Tuamese sejak ratusan tahun silam.

Mata pencaharian penduduk selain bertani lahan kering adalah memasak garam tradisional, membuat gula dan arak dari air nira lontar.

Penduduk memanfaatkan pohon lontar yang berderet di sekitar danau dan tepi pantai Laut Timor sebagai sumber air nira. Setelah disadap, air nira dijual langsung, atau diproses menjadi gula merah, gula air, gula semut maupun arak.

Karena itu, selain menikmati pemandangan danau dan laut, pengunjung dapat menyaksikan aktivitas penyadap di atas pohon lontar setinggi 25 meter. Mereka mengiris bulir muda lontar untuk mendapatkan air nira. Wadah air nira tergelantungan di ujung bulir dan pinggang penyadap.

Nira lontar yang diambil pada pukul 05.00 - 08.00 Wita jauh lebih manis dibanding yang diambil lebih siang. Pengunjung juga bisa menyaksikan warga memproses air nira menjadi gula maupun arak.

Warga Tuamese menyebut arak dengan sebutan moke. Arak dihargai Rp 15.000 per botol ukuran 250 ml. Namun, sebagian besar penyadap menjual arak dalam jeriken seharga Rp 100.000, kalau dipindahkan, setara dengan delapan botol. Di Kupang, arak tersebut dijual dengan harga Rp 40.000 - Rp 70.000 per botol.

Jika Anda mencari petualangan baru, berburu pemandangan alam yang masih murni, mari berwisata ke Tuamese. Menikmati surga Danau Tuamese serta manisnya gula nira.

(KORNELIS KEWA AMA)

Judul	PUPR Gelontorkan Rp 78,75 miliar di NTB	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Tempo (Halaman 6)		
Resume	Kementerian PUPR, melalui SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi NTB, menggelontorkan dana program BSPS sebesar Rp 78,75 miliar.		

PUPR Gelontorkan Rp 78,75 Miliar di NTB

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, menggelontorkan dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 78,75 miliar. Dana ini akan digunakan untuk merenovasi rumah tak layak huni milik masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. “Kami akan memanfaatkan dana tersebut untuk membedah 4.500 unit rumah masyarakat yang tidak layak huni,” kata Kepala SNVT Penyediaan Perumahan NTB, Bulera, kemarin.

Bantuan bedah rumah ini akan disalurkan Kementerian PUPR melalui bank penyalur yang nantinya diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk bahan bangunan. Besaran

pembagian bantuan diatur dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 158/KPTS/M/2019 tentang Besaran Nilai dan Lokasi BSPS Tahun Anggaran 2019. Bantuan untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 35 juta. Adapun untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta. ● EKO WAHYUDI

Judul	Kota Bekasi Tolak Limpahan Kemacetan dari Jalan Tol Cikampek	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Tempo (Halaman 17)		
Resume	Pemerintah Kota Bekasi memprotes pengelola jalan tol Jakarta-Cikampek, PT Jasa Marga, yang menyarankan kendaraan untuk keluar dari jalan tol menuju jalan arteri.		



Kemacetan di Jalan Arteri Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

cetan di jalan tol Cikampek ke Jalan Kalimalang yang sudah sangat padat. "Jadi membuat Jalan Kalimalang seperti jalan tol yang macet. Ini jebakan Batman," kata Johan.

Menurut Johan, Pemerintah Kota Bekasi tengah mempertimbangkan rencana untuk mengalih kendaraan berat yang berasal dari jalan tol Lingkar Luar menuju Jalan Kalimalang. Angkutan berat yang sebagian besar berasal dari pelabuhan itu memang kerap melintasi jalan arteri untuk menuju Kawasan Industri di Cikarang, ketika jalan tol Cikampek sedang macet.

Di samping itu, menurut Johan, salah satu pengembangan jalan tol Becakayu juga berencana memasang portal untuk merampungkan *ramp on* dan *ramp off* di Jalan Ahmad Yani. Portal akan dipasang pada pintu tol yang mengarah ke Jalan Kalimalang. "Pembangunan jalan tol Becakayu sudah mau sampai Jalan Hasibuan. Ini juga mengganggu kelancaran lalu lintas di Jalan Kalimalang," ujar Johan.

Corporate Communications Department Head PT Jasa Marga, Irra Susiyanti, membenarkan adanya imbauan dari Jasa Marga melalui Twitter serta pesan pendek di *variable message signs* (VMS) jalan tol. Jasa Marga menawarkan agar pengguna jalan tol Cikampek beralih ke rute tak berbayar atau menggunakan moda transportasi lain. "Tapi kalau tetap mau lewat tol yang kondisinya sedang macet juga dipersilakan dengan segala konsekuensinya," kata dia.

Menurut Irra, kemacetan terjadi karena perampungan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional di sekitar jalur tol Jakarta-Cikampek. Proyek-proyek ini memiliki konsekuensi mengurangi kapasitas dan jumlah ruas jalan. Dia mengklaim, Jasa Marga telah berupaya meminimalkan kemacetan dengan pengaturan waktu pengerjaan proyek.

"Selesaiannya pembangunan jalan tol *elevated* (layang) akhir 2019, kami harapkan, dapat menambah kapasitas di jalan tol dan mengurangi kepadatan yang terjadi," ujar Irra.

● IMAM HAMDI | ADI WARSONO

KOTA BEKASI TOLAK LIMPAHAN KEMACETAN DARI JALAN TOL CIKAMPEK

Portal akan dipasang di pintu jalan tol menuju Jalan Kalimalang.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA - Pemerintah Kota Bekasi memprotes pengelola jalan tol Jakarta-Cikampek, PT Jasa Marga, yang menyarankan kendaraan untuk keluar dari jalan tol menuju jalan arteri. Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bambang Nurmawan Putra, mengatakan imbauan tersebut membuat ruas arteri, seperti Jalan Kalimalang hingga perbatasan Kabupaten Bekasi,

macet parah. "Terdampak sekali, terutama pada Sabtu dan Minggu," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Bambang menerangkan, beberapa ruas jalan di Kota Bekasi mengalami macet total hingga puluhan kilometer pada Sabtu lalu. Hari itu, pukul 09.12 WIB, akun resmi PT Jasa Marga di media sosial Twitter mencuit imbauan bagi pengemudi yang berada di jalan tol Cikampek. Jasa Marga menginformasikan kemacetan di jalan tol Cikampek, dari Kilometer 7 di Jatibening hingga Kilometer 38 di Cikarang Timur.

Jasa Marga menyarankan agar pengemudi mencari rute alternatif di luar jalan tol Cikampek melalui pintu tol terdekat. Akibatnya, dari pusat kemacetan di sekitar Cikunir, banyak pengendara yang keluar melalui pintu tol Jatibening. Pengemudi kendaraan berat di jalan tol Lingkar Luar Jakarta pun melakukan hal serupa, dengan keluar di pintu tol Kalimalang.

Kendaraan yang keluar dari jalan tol Cikampek dan jalan tol Lingkar Luar membeludak ke Jalan Kalimalang yang hanya memiliki dua ruas. Padahal, kondisi Jalan Kalimalang pun rusak dengan lubang di banyak tempat serta permukaan yang tak rata. Jalan Kalimalang rusak karena terus dilalui kendaraan berat proyek pembangunan jalan

tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

"Kondisi Jalan Kalimalang saat ini sudah parah. Kok bisa-bisanya menyarankan pengemudi ambil jalur alternatif," kata Bambang.

Kepala Bidang Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan, menyatakan keberatan serupa. Menurut dia, imbauan yang dikeluarkan Jasa Marga tak tepat dan merugikan Kota Bekasi. Kendaraan limpaan dari jalan tol Cikampek, kata dia, menambah beban Jalan Kalimalang.

Menurut Johan, Jasa Marga seharusnya mengecek lebih dulu kondisi jalan arteri yang akan dijadikan jalur alternatif. Pada Sabtu lalu, dia menilai, Jasa Marga hanya menularkan kema-

Judul	Kemacetan di Jalan Tol Cikampek Menular sampai Bogor	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Tempo (Halaman 18)		
Resume	Kemacetan lalu lintas akibat sejumlah proyek infrastruktur di sekitar jalan tol Jakarta-Cikampek tak hanya tumpah ke jalan Kalimalang, Bekasi, dan sekitarnya.		

Kemacetan di Jalan Tol Cikampek Menular Sampai Bogor

Jasa Marga mengklaim telah bertindak berdasarkan prosedur operasi standar.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA— Kemacetan lalu lintas akibat sejumlah proyek infrastruktur di sekitar jalan tol Jakarta-Cikampek tak hanya tumpah ke Jalan Kalimalang, Bekasi, dan sekitarnya. Pada Sabtu dan Ahad lalu, kemacetan pun menular hingga wilayah Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bekasi mencatat kelumpuhan total di Jalan Kalimalang hingga perbatasan Kabupaten Bekasi pada Sabtu lalu. Kemacetan panjang itu disebabkan oleh masuknya kendaraan dari jalan tol Cikampek melalui Gerbang Tol Jatibening menuju Jalan Kalimalang. Sejumlah kendaraan berat juga keluar di Gerbang Tol Kalimalang untuk menghindari kemacetan total di Simpang Susun Cikunir.

"Di simpang Mall BCP (Bekasi Cyber Park), kami bersama kepolisian harus bekerja ekstra," kata Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Bambang Nurmawan Putra. Sebab, simpang Mall BCP merupakan jantungnya Kota Bekasi, ketika lalu lintas di sana terhambat, "Kemacetan akan menjalar ke simpang-simpang terdekat."

Kemacetan di jalan tol Jakarta-Cikampek beberapa hari terakhir memang semakin parah. Pada hari kerja saja, antrean kenda-



Kendaraan di samping pembangunan proyek nasional jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) di jalan arteri Kota Bekasi, Jawa Barat, kemarin.

raan bisa mencapai puluhan kilometer. Pada akhir pekan, kemacetan semakin menjadi-jadi. Sabtu lalu, ratusan pengemudi terjebak dalam kemacetan total, dari Gerbang Tol Jatibening di Kilometer 7 hingga Gerbang Tol Cikarang Timur di Kilometer 38.

Kemacetan parah disebabkan oleh makin sempitnya ruas jalan tol Cikampek, khususnya rute Jakarta-Cikampek. Penyempitan

terjadi akibat pembangunan tiga proyek nasional yang pengerjaannya memakan badan jalan, yaitu pembangunan jalur kereta *light rail transit* (LRT) di sisi badan jalan tol Jakarta-Cikampek, pembangunan jalur kereta cepat di sisi badan jalan tol Cikampek-Jakarta, dan pembangunan jalan tol layang di tengah-tengah jalur tol Jakarta-Cikampek.

Seorang pengemudi,

Syahrul Shaleh, bercerita. Sabtu lalu, dia sengaja keluar di Gerbang Tol Jatibening untuk menghindari kemacetan di bawah Simpang Susun Cikunir. Syahrul memilih keluar jalan tol melalui jalur arteri di Jalan Kalimalang daripada harus bertahan hingga Gerbang Tol Bekasi Barat atau Gerbang Tol Bekasi Timur. Padahal, kedua gerbang tol itu jaraknya lebih dekat dengan tujuan dia,

Kota Bekasi. "Kalau sudah macet (di jalan tol Cikampek) kecepatan kendaraan paling tinggi hanya 10-20 kilometer per jam," kata lelaki berusia 32 tahun itu.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Bogor, Ajun Komisaris Muhammad Fadli Amri, memaparkan imbas kemacetan jalan tol Cikampek sampai ke wilayah kerjanya. Pada akhir pekan lalu,

menurut dia, kendaraan menuju kawasan Puncak nyaris tak bergerak sejak 10 kilometer sebelum Gerbang Tol Ciawi. Musababnya, sebagian besar pengendara yang ingin pergi ke Bandung memilih rute melalui Bogor dan Ciawi karena lumpuh totalnya jalan tol Jakarta-Cikampek.

Kepolisian Resor Kota Bogor sempat melakukan rekayasa lalu lintas dengan pemberlakuan sistem satu arah kendaraan. Namun, upaya itu tak memberikan efek signifikan karena penumpukan kendaraan tetap terjadi. "Kami sudah lakukan berbagai cara, untuk mengurangi kepadatan, namun jumlah kendaraan terus bertambah," kata Fadli.

Kepala Departemen Komunikasi PT Jasa Marga, Irra Susiyanti, mengklaim perusahaannya telah mengambil tindakan sesuai dengan prosedur operasi standar ketika terjadi kemacetan total di ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Jasa Marga, kata dia, juga telah berupaya mengatur siklus pekerjaan konstruksi tiga proyek infrastruktur nasional agar tak menimbulkan kemacetan total. "Sudah diatur dengan *windows time* pekerjaan proyek. Manajemen konstruksi juga dilakukan agar tak mengganggu lalu lintas," kata Irra kepada *Tempo*, Ahad lalu.

● ADI WARSONO LADE RIDWAN
YANDWIPUTRA

Judul	PENGADAAN LAHAN TOL ACEH—SIGLI: Utama Karya Siapkan Rp842 Miliar	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	PT Utama Karya (Persero) menyiapkan dana sebanyak Rp842 miliar untuk pengadaan lahan pada proyek jalan tol Banda Aceh—Sigli. Dana tersebut khusus dialokasikan untuk pengadaan lahan sepanjang 2019.		

► PENGADAAN LAHAN TOL ACEH—SIGLI

Hutama Karya Siapkan Rp842 Miliar



Bisnis, JAKARTA — PT Utama Karya (Persero) menyiapkan dana sebanyak Rp842 miliar untuk pengadaan lahan pada proyek jalan tol Banda Aceh—Sigli. Dana tersebut khusus dialokasikan untuk pengadaan lahan sepanjang 2019.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Direktur Keuangan Utama Karya, Anis Anjayani mengatakan pihaknya memiliki kewajiban dalam memberikan dana talangan pembebasan lahan sesuai dengan amandemen perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT).

Dia menambahkan, amandemen PPJT dilakukan pada 27 Mei 2019 lalu. "Amandemen itu terkait kewajiban Utama Karya dalam memberikan dana talangan tanah. Khusus 2019 [dialokasikan] Rp842 miliar," jelas Anis kepada *Bisnis*, Senin (8/7).

Dia mengimbuhkan, sebagaimana perusahaan jalan tol, badan usaha jalan tol juga memiliki kewajiban dalam memberikan talangan tanah terlebih dahulu. Dana tersebut akan dikembalikan

negara lewat Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN.

Berdasarkan data monitoring Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), per 28 Juni 2019, progres pembebasan lahan jalan tol Banda Aceh—Sigli telah mencapai 41,22% dan progres konstruksi 3,31%.

Pembebasan lahan sejauh ini telah berlangsung di empat seksi dari total seksi. Sementara itu, konstruksi baru dimulai pada seksi 3 (Indapuri—Blang Bintang) sejauh 13,5 kilometer.

Dalam catatan *Bisnis*, progres jalan tol Banda Aceh—Sigli terbilang cepat. Pasalnya, proyek jalan tol sepanjang 74 kilometer ini telah dicanangkan pada Desember 2019 lalu. BPJT mencatat investasi untuk proyek jalan tol pertama di Aceh ini mencapai Rp12,35 triliun.

Di sisi lain, HK juga menjajaki pin-

jaman dari sindikasi perbankan untuk mendanai pembangunan jalan tol Banda Aceh—Sigli.

Anis sebelumnya menyebut, sejumlah bank dan lembaga pembiayaan sudah berminat untuk partisipasi dalam pembiayaan ruas Banda—Aceh. Calon kreditor itu antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Selanjutnya PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Mega Tbk., dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Anis menerangkan, ruas Banda Aceh—Sigli merupakan proyek penugasan kepada perseroan, sehingga pemerintah bakal memberikan penjaminan atas pinjaman yang diperoleh Utama Karya. Porsi pinjaman bakal memenuhi 30% terhadap kebutuhan investasi jalan tol, sedangkan 70% sisanya berasal dari ekuitas Utama Karya.

TOL NGAWI—KERTOSONO

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan amandemen perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT) dengan PT Jasamarga Ngawi Kertosono (JNK), operator jalan tol Ngawi—Kertosono. Amandemen ini hanya berlangsung satu

tahun setelah jalan tol itu beroperasi penuh sejak 2018.

Berdasarkan informasi dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), amandemen PPJT Ngawi—Kertosono dilakukan pada 1 Mei 2019.

Direktur Utama JNK, Iwan Moedyarno pihaknya melakukan adendum pada PPJT yang pertama kali diteken pada Juni 2011. "Iya betul, itu adendum PPJT tambah lingkup yang Kediri," ujar Iwan kepada *Bisnis*, Senin (8/7).

Untuk diketahui, JNK meneken PPJT pada 2011 untuk pengusahaan ruas tol Ngawi—Kertosono sepanjang 86,7 kilometer. PPJT meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan ruas tol. JNK mendapat hak pengusahaan jalan tol Ngawi—Kertosono selama 35 tahun.

Jalan tol Ngawi—Kertosono beroperasi penuh pada 2018, tiga tahun sejak mulai konstruksi pada 2015. Jalan tol ini menjadi bagian dari jalan tol di koridor Trans Jawa.

Pada perkembangan selanjutnya, jalan tol Ngawi—Kertosono akan diperpanjang ke Kediri sejalan dengan rencana pembangunan bandara internasional di Kediri.

Iwan Moedyarno sebelumnya menutur-

► HK juga menjajaki pinjaman dari sindikasi perbankan untuk mendanai pembangunan jalan tol Banda Aceh—Sigli.

► Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) juga melakukan amandemen perjanjian perusahaan jalan tol (PPJT) dengan PT Jasamarga Ngawi Kertosono (JNK), operator jalan tol Ngawi—Kertosono.

kan, jalan tol ekstensi itu direncanakan akan dibangun sepanjang 27 kilometer. Saat ini perseroan masih menunggu penetapan lokasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Iwan, proses pembebasan lahan akan dimulai setelah lokasi ditetapkan.

Dia mengharapkan, proses pembebasan lahan bisa dimulai pada semester kedua 2019 sehingga tahap konstruksi bisa dimulai pada awal 2020. Untuk diketahui, tahap konstruksi bisa dimulai bila lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek sudah dibebaskan sebesar 70% dari kebutuhan. ■

Judul	Layanan PDAM Belum Optimal	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kementerian PUPR terus mendorong PDAM untuk terus meningkatkan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3) kepada masyarakat.		

► AIR MINUM

Layanan PDAM Belum Optimal

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk terus meningkatkan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip kualitas, kuantitas dan kontinuitas (K3) kepada masyarakat.

Kementerian PUPR melalui Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) telah mengeluarkan hasil penilaian kinerja PDAM tahun 2018 terhadap 374 PDAM dari 391 PDAM yang ada di Indonesia.

Penilaian dilakukan untuk tahun buku 2017, untuk melihat dan mengukur tingkat kinerja manajemen, efisiensi dan efektivitas pengelolaan PDAM. Hasilnya sebanyak 223 PDAM (57%) berkinerja sehat, 99 PDAM (25%) kurang sehat, 52 PDAM (13%) berkinerja sakit dan 17 PDAM (5%) belum dinilai kinerjanya.

"Kelancaran pembayaran pelanggan PDAM juga dipengaruhi karena PDAM belum memberikan pelayanan air minum yang memenuhi prinsip K3 secara optimal. Misalnya pelayanan pada loket pembayaran PDAM" kata Kepala BPPSPAM Bambang Sudiatmo dalam rilisnya, Minggu (7/7).

Untuk bisa memenuhi layanan K3,

Bambang Sudiatmo menambahkan kualitas air PDAM dapat ditingkatkan dengan cara melakukan uji kualitas air minum secara teratur dan meningkatkan jam operasi layanan dari 5 jam ke 24 jam dengan mengoptimalkan sistem yang ada.

Adapun, untuk mendorong masyarakat rajin membayar tagihan, PDAM dapat memperbanyak loket pembayaran dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembayaran online serta memberikan hadiah kepada pelanggan yang membayar tagihan air minum tepat waktu.

PDAM juga harus secara rutin melakukan penggantian meter air pelanggan yang usianya sudah di atas lima tahun untuk menghindari kebocoran air non-fisik.

PDAM juga harus terus memperluas layanan dengan membangun jaringan distribusi dengan memanfaatkan kapasitas berlebih PDAM yang masih ada.

"Di PDAM Maluku Tenggara, idle capacitynya 26,51 liter per detik yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas cakupan layanan sebanyak 3.345 sambungan rumah (SR). Hal itu menjadi potensi pendapatan bagi PDAM sebesar Rp2 miliar selama 5 tahun," kata Bambang. *(Krisia P. Kinanti)*

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Progres pembangunan Ruas I Serang—Rangkasbitung sepanjang 26,5 km sebagai pendukung KEK Tanjung Lesung saat ini telah mencapai 96% dan ditargetkan rampung pada Desember 2019 dan mulai dioperasikan Februari 2020.		

► **KEK TANJUNG LESUNG**



Antara/Asap Fathulrahman

Pekerja beraktivitas di area proyek pembangunan Jalan Tol Serang—Panimbang di Kampung Landak, Petir, Serang, Banten, Senin (8/7). Progres pembangunan Ruas I Serang—Rangkasbitung

sepanjang 26,5 km sebagai pendukung KEK Tanjung Lesung saat ini telah mencapai 96% dan ditargetkan rampung pada Desember 2019 dan mulai dioperasikan Februari 2020.

Judul	Progres Tol Serang—Panimbang Capai 29%	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., masih terus membangun tol Serang—Panimbang untuk mendukung KEK Tanjung Lesung.		

Progres Tol Serang—Panimbang Capai 29%

Bisnis, JAKARTA — PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., masih terus membangun tol Serang—Panimbang untuk mendukung kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menuturkan bahwa saat ini realisasi progres dari pembangunan tol Serang—Panimbang masih berjalan sesuai rencana perusahaan.

“Tol Serang—Panimbang sekarang *under construction* di progres 29,20%,” ujarnya menjawab pertanyaan *Bisnis*, pekan lalu.

Menurut Mahendra, beberapa waktu yang lalu tol ini tersangkut dengan beberapa permasalahan di lahan, tetapi saat ini beberapa lahan sudah dibebaskan dan konstruksinya tetap berjalan.

Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan sejumlah pihak telah menyatakan ketertarikan untuk mengambil alih saham perseroan di PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

Di BUJT tersebut, WIKA

memiliki saham hingga 80%. “Serang—Panimbang sudah kami tawarkan ke mana-mana dan banyak yang berminat.”

Adapun, pembangunan jalan tol Serang—Panimbang sepanjang 83,70 kilometer dibagi menjadi tiga seksi yakni seksi 1 (Serang—Rangkas Bitung) sepanjang 26,50 kilometer, seksi 2 (Rangkas Bitung—Bojong) sepanjang 33 kilometer, dan seksi 3 (Bojong—Panimbang) dengan panjang 24,40 km.

Dalam proyek yang dibangun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pemerintah memberi dukungan infrastruktur dengan membangun tol pada seksi 1 sepanjang 33 km, sedangkan 50,67 km sisanya dikerjakan oleh badan usaha jalan tol, yakni PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Nilai investasi yang dikerjakan badan usaha mencapai Rp5,33 triliun.

Pada pemberitaan sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Sugiyartanto mengatakan bah-

wa pihaknya memprioritaskan jalan nasional untuk wilayah industri di sekitaran Tanjung Lesung.

“Jadi kita baru memfasilitasi untuk industrinya dulu, kalau ke pariwisata Tanjung Lesungnya kan lebih banyak kendaraan kecil ini menggunakan jalan nasional, kalau jalan nasional tanggung jawab APBN,” ujarnya.

Sugiyartanto menambahkan, untuk jalan nasional dari Banteng menuju ke Tanjung Lesung sepanjang 70 kilometer, dan saat ini masih dalam proses akan dibangun jalan tol yang menuju ke arah Tanjung Lesung yakni tol Serang—Panimbang.

Menurut catatan Kementerian PUPR, saat ini pihaknya telah membangun Jalan Nasional dengan progres preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan — Preservasi dan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Pasauran-SP Labuan—Cibaliung dan Citeureup—Tj.Lesung sepanjang 63,2 km dan Preservasi Jalan Cilegon—Pasauran—SP Labu-

an—Cibaliung—Citeureup—Tj Lesung sepanjang 39,4 km. Preservasi ini termasuk pemeliharaan rutin, rutin kondisi, dan penunjang jalan.

Lalu, preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan — Preservasi dan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Pasauran—SP Labuan—Cibaliung dan Citeureup—Tj Lesung sepanjang 7,46 km, preservasi Jalan Ruas Cilegon—Pasauran—SP Labuan—Cibaliung—Citeureup—Tj Lesung sepanjang 2,8 km.

Selanjutnya, pelebaran Jalan Menuju Standar — Preservasi dan Pelebaran Jalan Menuju Standar Ruas Pasauran—SP Labuan—Cibaliung dan Citeureup—Tanjung Lesung sepanjang 4,39 km.

Jalan tol ini akan menghubungkan setidaknya empat Kota/Kabupaten otonom, yakni Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang yang diharapkan juga bisa menggerakkan ekonomi baru pada kawasan strategis tersebut. (*Krizia P. Kinanti*)

Judul	APARTEMEN DI BEKASI: Pengembang Andalkan Infrastruktur	Tanggal	Selasa, 9 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Sejumlah pengembang properti terus menapakkan kakinya di Bekasi, Jawa Barat untuk pengembangan proyek-proyeknya tahun ini. Dengan adanya sejumlah pengembangan infrastruktur dinilai pengembang membuat Bekasi makin potensial.		



▶ APARTEMEN DI BEKASI

Pengembang Andalkan Infrastruktur

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah pengembang properti terus menapakkan kakinya di Bekasi, Jawa Barat untuk pengembangan proyek-proyeknya tahun ini. Dengan adanya sejumlah pengembangan infrastruktur dinilai pengembang membuat Bekasi makin potensial.

Mutiara Nabila
redaks@bisnis.com

Head of Marketing Rumah.com Ike Hamdan mengatakan bahwa pengembangan di Bekasi bisa dikatakan makin potensial dengan adanya pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Mulai dari sarana transportasi massal seperti *light rail transit* (LRT), Tol Becakayu, hingga Elevated Tol Jakarta—Cikampek.

LRT sendiri sebagian akan rampung dan siap beroperasi dalam waktu dekat ini. Proyek tahap 1 akan melalui rute, Cibubur—Cawang—Bekasi Timur dan Cawang—Dukuh Atas. Sementara itu, LRT fase 1 A dan Fase 1 B akan membentang dari Cibubur—Cawang—Dukuh Atas sepanjang 24,2 km dan Bekasi Timur—Cawang—Dukuh Atas sepanjang 17,9 km.

“Pasca-LRT beserta Elevated Tol ini jadi, diprediksi harga apartemen yang berada dalam radius nol kilometer seperti di LRT City Bekasi Timur Green Avenue akan naik dua sampai tiga kali lipat.

▶ **PWON segera membangun bangunan multi guna yang terdiri atas 4 menara apartemen, 1 mal, dan 2 menara hotel di atas lahan seluas sekitar 3,6 hektare.**

Tentunya ini menjadi potensi investasi yang sangat besar,” ungkapnya melalui laporan resmi, Senin (8/7).

Ike menambahkan mayoritas pencari hunian di Bekasi masih berasal dari kalangan *end-user* terutama untuk pengembangan properti yang memang dekat dengan infrastruktur yang sedang dibangun.

“Mengetahui profil konsumen, 70%-nya berasal dari kalangan *end user* dengan kategori pasangan atau keluarga muda dengan 1—2 orang anak,” sambungnya.

Adanya infrastruktur, kata Ike, terbukti memang membantu akselerasi penjualan properti di sekitarnya. Menurutnya, produk-produk pengembang jadi cepat *sold out*, ini juga karena kebutuhan akan

hunian yang tinggi. Adapun, jika mengamati pergerakan market secara umum, 2019 menurut Ike akan menjadi tahun emas bagi sektor properti di Bekasi.

Namun, melihat kondisi ketersediaan lahan yang semakin menipis. Ike merekomendasikan pengembang ke depan untuk membangun properti residential yang vertikal atau apartemen. Hal itu dilakukan agar bisa menyeimbangkan antara pasokan dengan permintaan yang terus bertumbuh.

Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) Stefanus Ridwan mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk mulai pengembangan di Bekasi karena terdapat beberapa proyek infrastruktur seperti jalan tol Bekasi—Cawang—Kampung Melayu (Becakayu) dan kereta ringan (LRT).

“Di Bekasi kami sekarang dalam tahap urus izinnya, semoga akhir tahun ini mulai pembangunan properti mixed-use di Bekasi Barat,” katanya kepada *Bisnis* belum lama ini.

Menurut rencana, PWON segera membangun bangunan multi guna yang terdiri atas 4 menara apartemen, 1 mal, dan 2 menara hotel di atas lahan seluas sekitar 3,6 hektare. Adapun, pengembangan ini akan menasar pada konsumen kelas menengah hingga menengah atas.

Ridwan menuturkan bahwa pilihan pengembangannya jatuh ke Bekasi karena daerahnya yang sudah sangat berkembang dan daya belinya yang terus meningkat.

Selain itu, untuk pengembangan terbaru itu, PWON akan mengusahakan agar bisa menjadi bangunan berkonsep *transit oriented development* (TOD).

“Jadi pengembangan ini kan butuh waktu sekitar 3 tahun, kalau mulai akhir tahun ini nanti pas jadi kan sudah ada LRT, tol Becakayu sudah jadi, ada beberapa tambahan *flyover* juga. Jadi saya kira nanti solusi soal aksesnya gampang. Dan kita mikirin juga *gimana* supaya bisa terhubung ke LRT seperti di Blok M,” lanjut Ridwan.

APARTEMEN INDEKOS

Hal senada disampaikan CEO Gapura Prima Group Rudy Margono yang mengembangkan sejumlah apartemen di daerah Bekasi Timur. Rudy mengatakan bahwa yang menjadi sasarannya di sana adalah untuk indekos dan sebagai sarana investasi.

“Jadi kalau di sini [Bekasi Timur] itu memang menurut saya lebih banyak untuk investasi, bukan kemudian apartemen-nya sepi tidak ada yang menguhuni, tapi karena memang orang beli kebanyakan untuk investasi,” jelasnya.

Rudy menyebutkan bahwa dari proyek-proyek apartemen yang dibangun, 90% target pembelinya adalah investor yang biasanya berasal dari kalangan penyewa untuk dijadikan indekos oleh mahasiswa atau memang membeli apartemen itu untuk ditempati beberapa tahun ke depan.

Rudy melanjutkan, pengembangan

apartemen tower Costello beberapa bulan lalu dilakukan untuk mengakomodasi tingginya permintaan pasar untuk hunian vertikal modern, khususnya di Bekasi Timur. Adapun, Gapura Prima turut mengandalkan pengembangan infrastruktur sebagai optimisme dalam pembangunan proyek-proyeknya.

“Nanti proyek ini jaraknya hanya 100 meter dari *exit* tol Bekasi Timur, lalu mau ada LRT juga, akses ke lokasi jadi mudah. Ditambah dekat dengan fasilitas seperti mal dan rumah sakit kan yang persis di depannya, ini potensi permintaannya tinggi sekali,” katanya.

Selanjutnya, Direktur Marketing Modern Kranji Apartement Henricus Andreka Irvandawisnu juga mengantungkan potensi pengembangan proyeknya di Bekasi dari segi kemudahan aksesnya kepada pengembangan jalan tol Becakayu.

Andreka mengklaim bahwa Modern Kranji merupakan satu-satunya apartemen yang berada di Jalan Pemuda, Kranji yang terhubung langsung dengan fasilitas transportasi publik dan sangat dekat dengan terminal Kranji.

“Jarak antara Stasiun dan apartemen yakni sekitar 300 meter hingga 400 meter, untuk ke kota cukup menaiki *commuter line* hingga Dukuh Atas,” ujarnya.

Selain itu, akses tol Becakayu bisa dicapai dalam 10 menit, tol Cikunir-Pondok Indah dalam 10 menit, stasiun kereta api Kranji dalam 3 menit, stasiun LRT terdekat dalam 15 menit. □